

## **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra)-SKPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renstra SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

---

Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, merubah status kelembagaan PTSP di Kabupaten Bone. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan penggabungan antara penyelenggara PTSP yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dengan Kantor Promosi Penanaman Modal (KPPM). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

Dengan lahirnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diharapkan dapat meningkatkan minat investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya/berinvestasi sehingga mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bone menjadi lebih baik.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

---

Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone mencakup semua program dan kegiatan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone.

Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bentuk dukungan terhadap program dan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, proses penyusunan Renstra OPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023.

Hubungan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai pedoman dalam menyusun Renstra SKPD dan bersifat indikatif, maksud bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik sumber daya yang diperlukan maupun dikeluarkan dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Renstra SKPD sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dari program dan kegiatan di tahun berjalan.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentng keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentng Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 215);
  10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Kepala Badan Koordinasi

- 
- Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman dan tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
  19. Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Bone yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 4);
  20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 16 tahun 2016 tentang Penanaman Modal;
  23. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone
  24. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 tahun 2015 tentang Penyederhaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bone;
  25. Peraturan Bupati Bone Nomor 43 tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala badan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Bone;
  26. Peraturan Bupati Bone Nomor 16 tahun 2017 tentang Mekanisme dan tata cara Pelayanan perizinan dan Non perizinan pada Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Bone;
  27. Peraturan Bupati Bone Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bone Tahun 2017 - 2025;

---

### 1.3 Maksud dan Tujuan

**Maksud** disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai Pedoman Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun sebagai implementasi *Visi* dan *Misi* Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

**Tujuan** disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone :

1. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan sehingga tercipta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
2. Adanya keselarasan dan sinkronisasi dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan OPD selama 5 (lima) tahun;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terkait permohonan perizinan dan non perizinan;
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan wajib yaitu Urusan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
5. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pengembangan penanaman modal dan investasi daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yang strategis melalui sumber pembiayaan APBD.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Bone disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan penyajian sebagai berikut :

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan

---

Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPMPTSP Kab. Bone.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan serta isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Bone.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**  
Berisi uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Bone.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel T.C.27
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**  
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone

---

2018-2023. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel.T.C.28

## **BAB VIII PENUTUP**

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kabupaten Bone tahun 2018-2023.

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

**Tugas** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu melaksanakan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Sedangkan **Fungsi** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yaitu:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang penanaman modal, peprizinan dan non perizinan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan melalui Sekretaris Daerah. Adapun Susunan Struktur Organisasi dan Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pengkajian, pengembangan dan kebijakan penanaman modal , terdiri dari;
  - a. Seksi Pengkajian, pengembangan dan kebijakan penanaman modal ;

- 
- b. Seksi Pengembangan penanaman modal;
  - c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
  4. Bidang Kerjasama, promosi dan pelayanan penanaman modal terdiri dari;
    - a. Seksi Kerjasama Penanaman Modal;
    - b. Seksi Promosi Penanaman Moda; dan
    - c. Seksi Pelayanan Penanaman Modal.
  5. Bidang Data, Sistem Informasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari;
    - a. Seksi Data dan Potensi Penanaman Modal;
    - b. Seksi Informasi Penanaman Modal; dan
    - c. Seksi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal.
  6. Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelayanan Perizinan, terdiri dari:
    - a. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan; dan
    - b. Seksi Pelayanan Pendaftaran dan Penyerahan Perizinan.
  7. Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan terdiri dari ;
    - a. Seksi Pengkajian dan Penelitian Perizinan;
    - b. Seksi Penerbitan dan Pengarsipan Perizinan .
  8. Bidang Monitoring dan Evaluasi terdiri dari ;
    - a. Seksi Monitoring Penyelenggaraan Perizinan;
    - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan; dan
    - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan.
  9. UPTD
  10. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

---

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI  
DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BONE

---

## 2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### 2.2.1 Susunan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, ditahun 2018-2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone memiliki 73 orang pegawai terdiri dari :

- PNS : 30 orang
- Tenaga Honorer : 43 orang

Dengan Perincian sebagai berikut:

a.	Kepala Dinas		1	Orang
b.	Sekretariat		7	Orang
	- Sekertaris	:	1	Orang
	- Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian	:	1	Orang
	- Ka. Sub Bag Keuangan	:	1	Orang
	- Ka. Sub Bag Program	:	1	Orang
	- Pengelolah Keuangan	:	1	Orang
	- Pengelolah Sarana dan Prasarana	:	1	Orang
	- Penerima PAD	:	1	Orang
c.	Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelayanan PTSP	:	3	Orang
	- Kepala Bidang	:	1	Orang
	- Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran dan Penyerahan Perizinan	:	1	Orang
	- Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan	:	1	Orang
d.	Bidang Data, Sistem Informasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	:	4	Orang
	- Kepala Bidang Data, Sistem Informasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	:	1	Orang
	- Kepala Seksi Sistem Informasi	:	1	Orang

	- Kepala Seksi Data dan Potensi Penanaman Modal - Kepala Seksi Pengendalian dan Pelaksanaan penanaman Modal	:	1	Orang
e.	Bidang Kerjasama, Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal	:	3	Orang
	- Ka Bidang Kerjasama, Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal - Kepala Seksi Pelayanan Penanaman Modal - Kepala Seksi Kerjasama Penanaman Modal - Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal	:	1 1 1 -	Orang Orang Orang Orang
f.	Bidang Pengkajian, Pengembangan dan Kebijakan Penanaman Modal	:	5	Orang
	- Kepala Bidang Pengkajian, Pengembangan dan Kebijakan Penanaman Modal - Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal - Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal - Kepala Seksi Pengkajian dan Kebijakan Penanaman Modal	:	1 1 1 1	Orang Orang Orang Orang
g.	Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP	:	3	Orang
	- Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP - Kepala Seksi Pengkajian dan Penelitian perizinan - Kepala seksi Pengarsipan dan Penerbitan Perizinan	:	1 1 1	Orang Orang Orang
h.	Bidang Monitoring dan Evaluasi	:	4	Orang
`	- Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi	:	1	Orang

- Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan perizinan	:	1	Orang
- Kepala Seksi Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	:	1	Orang
- Kepala seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	:	1	Orang

*Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

a. Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	Eselon II	1 orang	Kepala Dinas
2.	Eselon III	7 orang	Ka. Bid & Sekretaris
3.	Eselon IV	18 orang	Ka. Sie & Ka. Subag
4.	Jabatan Fungsional Umum	4 orang	
5.	Tenaga Honorer	43 Orang	
	Jumlah	73 orang	

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	SD	-	
2.	SLTP	-	

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
3.	SLTA	1 Orang	
4.	SARMUD /D3	1 Orang	
5.	STRATA 1	21 Orang	
6.	STRATA 2	7 Orang	
	Jumlah	30 Orang	

c. Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Golongan IV	9	
2.	Golongan III	20	
3.	Golongan II	1	
4.	Golongan I		
5.	Non Golongan		
	Jumlah	30	

d. Berdasarkan Masa Kerja

NO	MASA KERJA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	0 tahun s/d 10 tahun	12	
2.	11 tahun s/d 15	4	
3.	tahun	1	
4.	16 tahun s/d 20	3	

---

NO	MASA KERJA	JUMLAH	KETERANGAN
5	tahun	3	
6.	21 tahun s/d 25 tahun	7	
	26 tahun s/d 30 tahun		
	31 tahun s/d 40 tahun		
	Jumlah	30	

e. Berdasarkan Jenis kelamin

NO	Jenis kelamin	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laki-laki	12	
2.	Perempuan	18	
	Jumlah	30	

*Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

### **2..2.2.Sarana dan Prasarana(Sarpras)**

Sarana dan Prasarana (Sarpras) kerja yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan untuk menunjang kelancaran tugas adalah sebagai berikut :

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN								
		2013		2014		2015		2016		2017
		UPTP	KPPM	BP2T	KPPM	BP2T	KPPM	BP2T	KPPM	DPMPTSP
1	Station Wagon	1	0	2	0	2	0	3	0	3
2	Sepeda Motor	7	2	7	2	7	2	7	4	11
2	Lemari Besi/Metal	7	0	7	0	7	0	8	0	8
3	Meja Rapat	1	0	1	0	1	0	1	0	1
4	Filing Besi Metal	5	3	5	3	5	3	5	3	8
5	Brankas	1	0	1	0	1	0	1	0	1
6	Sofa	2	0	2	0	2	0	2	0	2
7	AC Unit	3	3	3	4	4	5	8	6	14
8	Televisi	3	0	3	0	3	0	3	0	3
9	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	0	1	0	1	0	1	0	1
10	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	1	4	1	4	1	4	1	5
11	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20	7	20	7	20	7	20	7	27
12	Meja Kerja	5	4	5	4	5	4	5	4	9
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	1	4	1	4	1	4	1	5
14	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	7	5	15	5	17	5	17	5	22
15	Kursi Kerja	6	0	6	0	6	0	6	0	6
16	Kursi Tamu	1	0	1	0	1	0	3	0	3
17	Dispenser	1	0	1	0	1	0	1	0	1
18	Whiteboard	1	0	1	0	1	0	1	0	2
19	Lemari Kayu	8	0	8	0	8	0	8	0	8
20	Kursi Putar	1	0	11	0	11	0	11	0	11
21	Kursi Biasa (Futura)	13	0	13	0	13	0	13	0	13
22	Mini Komputer	5	0	5	0	5	0	5	0	5
23	Kipas Angin	1	0	6	0	6	0	6	0	6
24	Peralatan Jaringan Lainnya	1	0	1	0	1	0	1	0	1
25	Lemari Kaca	0	1	0	1	0	1	0	1	1
26	Rak Kaca	0	2	0	2	0	2	0	2	2
27	PC Unit/Komputer PC	0	2	3	2	4	2	6	2	13
28	Printer	3	1	11	2	14	3	21	3	29
29	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0	4	0	4	0	4	0	4	4
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0	4	0	4	0	4	0	4	4
31	Lemari Es	0	0	1	0	1	0	1	0	1
32	Komputer Lapotop/Notebook	0	0	5	2	6	2	6	4	13
33	Facsimile	0	0	2	1	2	1	2	1	2
34	Mesin Ketik Manual	0	2	0	2	-	2	1	2	3
35	Kursi Rapat	0	0	0	0	0	0	20	10	30
36	Server	0	0	0	0	0	0	1	0	1
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	0	1	0	1	0	2	0	2
38	Telephone (PABX)	0	0	0	0	0	0	1	0	1

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN								
		2013		2014		2015		2016		2017
		UPTP	KPPM	BP2T	KPPM	BP2T	KPPM	BP2T	KPPM	DPMPTSP
39	Sound Sistem	1	0	1	0	1	0	1	1	2
40	Layar Proyektor + Attachment	0	0	1	0	1	0	1	1	2
41	Camera +Attachment	0	0	0	0	0	0	0	0	1
42	Scanner	0	0	0	0	0	0	0	0	2
43	Camera CCTV	0	0	0	0	0	0	0	0	1
44	Kursi Kayu	0	3	0	3	0	3	0	3	3
45	Kursi Plastik	0	0	0	0	0	0	0	20	20

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.3.1. Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya 2013-2018, menurut Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator lainnya seperti MDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan penggabungan antara penyelenggara PTSP yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dengan Kantor Promosi Penanaman Modal (KPPM). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

---

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dalam hal melaksanakan pelayanannya senantiasa berpedoman pada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur, dengan tujuan adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, serta sebagai panduan bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya. Izin yang dikelola oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone sejak terbitnya Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2015 tentang penyederhaaan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bone adalah sebanyak 17 izin + 1 izin Penanaman Modal.

Proses pelayanan perizinan dapat dilakukan secara paralel/simultan dengan adanya Tim Teknis yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan perizinan yang terkoordinasi, terarah, dan tepat sasaran. Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) terdiri dari Unsur SKPD Teknis terkait perizinan dan juga Unsur DPMPTSP yang bertugas antara lain :

1. Memberikan kajian teknis terhadap pemrosesan perizinan;
2. Memberikan rekomendasi disetujui / ditolak untuk diterbitkan izin.
3. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan.

Sejak Tahun 2016 proses pelayanan perizinan pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menggunakan aplikasi on line melalui website *www. bp2t\_bone.id* dan ditahun 2017 berubah nama menjadi *www. dpmpstsp.bone.go.id* dan sms gateway dimana dalam aplikasi ini masyarakat dapat mengakses informasi tentang kegiatan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pendaftaran izin secara online, perhitungan retribusi IMB, tracking dokumen serta masyarakat dapat mendownload permohonan izin.

---

Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone didasarkan pada *review* pencapaian sasaran strategis Renstra Kantor Promosi dan Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2017 (Tabel T-C.23.)

**Tabel TC. 23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Bone**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				-	-	-	-	-	-	75,76	-	58,22	78	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				2.600.000.000	2.660.000.000	3.035.000.000	3.300.000.000	3.650.000.000	-	-	3.167.538.000	3.707.695.313	3.953.385.000			104%	112%	108%
	Terlaksananya Peninjauan Lokasi layanan perizinan				-	-	-	-	27 Kec	-	-	-	-	27 Kec	-	-	-	-	100%
	Jumlah Paket Pengembangan aplikasi Perizinan Online				-	-	3 Paket	3 Paket	3 Paket	-	-	3 Paket	3 Paket	3 Paket	-	-	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen data izin dan UMKM				-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100%	-
	Jumlah Dokumen RUPM				-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-					
	Jumlah kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal				6 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti				4 Keg	4 Keg	4 Keg	4Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4Keg	4 Keg	4 Keg	100%	100%	100%	100%	100%

Lanjutan tabel sebelumnya

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	jumlah peserta kegiatan Koordinasi Kerjasama				50 Peserta	50 Peserta	50 Peserta	50 orang	50 Peserta	50 orang	50 Peserta	50 Peserta	50 orang	50 Peserta	100%	100%	100%	100%	100%
	jumlah izin yang diterbitkan				5.000	5.500	5.500	8.750	8.750	4096	3.073	5705	9386	9.958	82%	56%	104%	107%	114%
	Jumlah dokumen SOP pelayanan Perizinan				-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	1 Dok	1 dok	1 Dok	-	-	100%	100%	100%
	Jumlah laporan hasil Monev penyelenggaraan Perizinan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Responden SKM				-	200 Responden	-	200 Responden	150 Responden	-	200 Responden	-	200 Responden	150 Responden	-	100%	-	100%	100%
	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi				-	-	400 Orang	400 Orang	150 orang	-	-	400 Orang	400 Orang	150 orang	-	-	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Peraturan Perundang Undangan				-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	100%	100%	100%

---

Adapun penjelasan dari hasil Tabel T-C.23 adalah sebagai berikut:

Jika dilihat dari tabel, secara keseluruhan pelayanan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik, tidak ada kesenjangan/gap pelayanan, karena semua sudah berjalan sesuai dengan tupoksi masing masing bidang. Untuk realisasi di tahun 2015 – 2017 ada 2 (dua) indikator kinerja yang terealisasi melebihi target yang ingin dicapai yaitu indikator penerbitan izin yang mendukung pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan HO (Izin Gangguan). Hal ini dapat dilihat dari kolom rasio capaian, pencapaian sangat didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya terlaksananya kegiatan sosialisasi sejak tahun 2015 dimana pada kegiatan ini disampaikan kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan izin baik izin usaha maupun izin mendirikan bangunan.

Pada indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang menjadi tolak ukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam hal pelaksanaan pelayanan perizinan berdasarkan tabel tersebut pada Tahun 2014 nilai IKM mencapai 75,76 atau setara dengan nilai A- dan ditahun 2015 pelaksanaan Survey tidak dilaksanakan dikarenakan terbatasnya anggaran, jumlah nilai IKM tahun 2016 mengalami penurunan dengan nilai 58,22 setara dengan nilai B dan jumlah IKM ditahun 2017 dan 2018 adalah 78 setara dengan nilai A- pencapaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat didukung dengan pelaksanaan beberapa indikator kegiatan yang berperan dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan perizinan seperti yang tergambar dalam tabel.

Pencapaian Penerbitan Dokumen Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi penerbitan Izin, dimana dalam tabel tersebut dapat dilihat beberapa izin pada tahun tertentu selama periode Renstra dilakukan perubahan regulasi terkait pelimpahan kewenangan penerbitan beberapa izin diantaranya izin Baruga sejak Tahun 2014 sudah tidak diterbitkan di Kantor BP2T, untuk izin IUPP, IUTM dan IUP2T mulai diterbitkan di BP2T pada tahun 2014 – 2015 dan untuk Tahun 2016-2017 sudah dilakukan Penyederhanaan izin berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 42 tahun 2015 tentang Penyederhaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bone.

Untuk pencapaian pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel pencapaian perubahan renstra 2018 di bawah ini :

*Rekapitulasi Penerbitan Izin Tahun 2013 - 2017*

NO.	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	1884	1.989	2.177	3.150	3.269
2	IZIN PRINSIP	19	32	22	28	66
3	IZIN LOKASI	2	-	2	6	10
4	SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)	173	123	95	82	97
5	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	791	794	1.145	1.225	938
6	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	904	864	1.145	1.230	939
7	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	17	9	5	4	2
8	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	36	38	32	29	18
9	TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)	36	38	32	29	18
10	IZIN USAHA BENGKEL	6	13	37	-	-
11	IZIN USAHA OPERASIONAL KEPARIWISATAAN (IUOK)	7	12	35	-	-
12	IZIN BARUGA 2013	71	-	-	-	-
13	SURAT IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA	54	1.029	639	-	-
14	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA MEDIS SELAKU DOKTER SPESIALIS/UMUM/GIGI	37	87	93	-	-
15	IZIN PENDIRIAN APOTIK	15	14	18	-	-
16	SURAT IZIN KERJA APOTEKER / ASISTEN APOTEKER	39	50	81	-	-
17	IZIN TOKO OBAT	5	2	6	-	-
18	IZIN PEMANFAATAN FASILITAS UMUM	-	-	-	-	-
19	IZIN PROGRAM LEMBAGA PELATIHAN KERJA	-	-	-	-	-
20	PERPANJANGAN IZIN / PENAMBAHAN JURUSAN	-	-	-	-	-
21	SERTIFIKAT LATIHAN LULUSAN LLS DAN LLP OLEH PERUSAHAAN	-	-	-	-	-
22	AKUNTABILITAS LULUSAN 1 TAHUN	-	-	-	-	-
23	IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP) 2014 – 2015	-	-	-	-	-
24	IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM) 2014 – 2015	-	-	-	-	-
25	IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUP2T) 2014 -2015	-	-	-	-	-
26	SURAT IZIN GANGGUAN (HO)	-	-	-	1.059	983
27	SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)	-	-	-	1.092	983
28	SURAT IZIN PENELITIAN	-	-	-	1.567	1.460
29	SURAT IZIN PERIKANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	-	-	-	0	0
30	SURAT IZIN REKLAME	-	-	-	0	0
31	SURAT IZIN TRAYEK	-	-	-	342	328
32	SURAT IZIN SARANA KESEHATAN	-	-	-	23	38
33	SURAT IZIN TENAGA KESEHATAN	-	-	-	453	754
34	SURAT IZIN LINGKUNGAN	-	-	-	41	57
<b>Jumlah</b>		<b>4096</b>	<b>5094</b>	<b>5564</b>	<b>10360</b>	<b>9960</b>

Rencana Strategis (Renstra)  
*DPMPSTSP Tahun 2018-2023*

**Tabel TC.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Bone**

URAIAN	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata rata pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	311.728.000	374.879.500	428.470.000	558.481.500	684.961.300	-	354.661.737	424.186.083	554.591.356	676.804.751	-	95%	99%	99%	99%	462.344.895	250.015.595
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	20.000.000	20.000.000	20.000.000	34.720.000	63.570.000	-	14.025.837	17.526.083	33.797.656	57.529.697	-	70%	88%	97%	90%	34.572.499	27.213.358
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	111.420.000	127.500.000	132.520.000	112.695.000	117.745.000	-	127.100.000	132.520.000	109.845.000	117.745.000	-	100%	100%	97%	100%	122.614.999	90.027.499
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	4.083.200	5.612.200	-	-	-	4.083.200	5.612.200	-	-	-	100%	100%	1.403.050	-
Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	10.639.500	-	-	-	-	10.639.500	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	14.740.000	-	-	-	-	14.739.900	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	25.000.000	20.000.000	7.860.000	10.140.000	-	13.500.000	19.995.000	7.860.000	8.620.000	-	54%	100%	100%	85%	15.749.999	9.118.749
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	50.000.000	140.000.000	120.000.000	175.000.000	200.000.000	-	139.986.500	119.993.000	174.882.200	199.748.754	-	100%	100%	100%	100%	158.749.999	123.655.988
Penyediaan Ongkos Kantor	33.008.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Makanan dan Minuman	-	32.000.000	-	-	-	-	29.670.000	-	-	-	-	93%	-	-	-	-	-
Penyediaan Administrasi Perkantoran	-	-	135.950.000	224.123.300	287.894.100	-	-	134.152.000	224.123.300	287.549.100	-	-	99%	100%	100%	128.004.350	-
Pelayanan Publik	80.000.000	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	1.250.000	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	451.790.000	339.685.000	461.450.000	430.150.000	-	417.399.871	335.891.973	450.085.549	419.806.565	-	92%	99%	98%	98%	307.821.249	301.446.021
Pembangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	80.500.000	-	231.700.000	-	-	80.500.000	-	231.700.000	-	-	100%	-	100%	-	1	-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	33.000.000	-	-	-	-	33.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-

URAIAN	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata rata pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	88.880.000	92.750.000	35.635.000	22.000.000	158.500.000	-	89.550.000	35.625.000	22.000.000	158.500.000	-	97%	100%	100%	100%	77.221.249	54.031.249
Pengadaan Mebeleur	-	26.300.000	-	28.000.000	-	-	26.300.000	-	28.000.000	-	-	100%	-	100%	-	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	147.000.000	199.500.000	37.500.000	100.000.000	-	147.000.000	199.500.000	37.500.000	100.000.000	-	100%	100%	100%	100%	84.249.999	84.249.999
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	35.500.000	90.540.000	91.950.000	93.500.000	120.000.000	-	59.349.871	88.166.973	82.135.549	109.656.565	-	66%	96%	88%	91%	98.997.499	69.989.771
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	14.700.000	12.600.000	15.750.000	51.650.000	-	14.700.000	12.600.000	15.750.000	51.650.000	-	100%	100%	100%	100%	19.999.999	19.999.999
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	13.500.000	-	21.160.000	-	-	-	-	21.160.000	-	-	-	-	100%	-	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	4.800.000	13.500.000	-	21.160.000	-	-	-	-	21.160.000	-	-	-	-	100%	-	3.374.999	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	84.600.000	191.995.500	125.568.000	287.000.000	122.903.500	-	142.974.000	125.568.000	280.425.000	109.263.500	-	74%	100%	98%	89%	181.866.749	128.814.124
Pendidikan dan Pelatihan Formal	25.800.000	75.000.000	3.960.000	30.261.000	-	-	26.998.000	3.960.000	30.261.000	-	-	36%	100%	100%	-	27.305.249	8.555.249
Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	58.800.000	79.035.500	60.358.000	94.939.000	77.903.500	-	78.505.500	60.358.000	94.024.000	77.903.500	-	99%	100%	99%	100%	78.058.999	58.071.374
Pelatihan service excelen	-	-	47.000.000	-	-	-	-	47.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Pelatihan Penggunaan Database	-	-	14.250.000	-	-	-	-	14.250.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	-	37.960.000	-	50.000.000	45.000.000	-	37.470.500	-	49.740.000	31.360.000	-	99%	-	99%	70%	11.250.000	-
training soft skill	-	-	-	86.800.000	-	-	-	-	81.400.000	-	-	-	-	94%	-	-	-
pelayanan publik	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	-	-	7.127.500	554.129.000	23.320.000	-	-	7.127.500	554.079.000	23.320.000	-	-	100%	100%	100%	144.362.250	-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	7.127.500	8.179.000	8.346.000	-	-	7.127.500	8.179.000	8.346.000	-	-	100%	100%	100%	4.131.250	-
Penyusunan Pelaporan Keuangan semester	-	-	-	-	7.582.000	-	-	-	-	7.582.000	-	-	-	-	100%	-	-

Rencana Strategis (Renstra)  
DPMPTSP Tahun 2018-2023

URAIAN	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata rata pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	-	-	-	-	7.392.000	-	-	-	-	7.392.000	-	-	-	-	100%	-	-
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa	-	-	-	272.975.000	-	-	-	-	272.950.000	-	-	-	-	100%	-	-	-
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	-	-	-	272.975.000	-	-	-	-	272.950.000	-	-	-	-	100%	-	-	-
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	-	-	-	500.550.000	-	-	-	-	484.011.000	-	-	-	-	97%	-	-
Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	-	-	-	-	40.550.000	-	-	-	-	40.540.000	-	-	-	-	100%	-	-
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	-	-	-	-	30.400.000	-	-	-	-	30.360.000	-	-	-	-	100%	-	-
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	13.624.000	-	-	-	-	45%	-	-
Penyelenggaraan pameran investasi	-	-	-	-	399.600.000	-	-	-	-	399.487.000	-	-	-	-	100%	-	-
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	-	12.375.000	9.668.000	359.024.000	-	-	12.340.000	9.308.000	359.024.000	-	-	100%	96%	100%	-	-
Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	-	-	12.375.000	9.668.000	-	-	-	12.340.000	9.308.000	-	-	-	100%	96%	-	-	-
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	-	-	-	-	276.800.000	-	-	-	-	276.800.000	-	-	-	-	100%	-	-
Pengumpuln dan pengolahan data izin dan realisasi investasi	-	-	-	-	82.224.000	-	-	-	-	82.224.000	-	-	-	-	100%	-	-
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	-	159.200.000	112.000.000	150.448.000	246.458.000	-	159.190.000	112.000.000	150.448.000	246.358.000	-	100%	100%	100%	100%	127.226.499	127.201.499

Rencana Strategis (Renstra)  
DPMPTSP Tahun 2018-2023

URAIAN	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata rata pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100%	-	-
Pengembangan Kemitraan	-	79.600.000	56.000.000	75.224.000	48.229.000	-	79.595.000	56.000.000	75.224.000	48.179.000	-	100%	100%	100%	100%	-	44.850.749
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	60.000.000	79.600.000	56.000.000	75.224.000	48.229.000	-	79.595.000	56.000.000	75.224.000	48.179.000	-	100%	100%	100%	100%	64.763.249	44.850.749
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	-	-	-	244.153.100	-	-	-	-	216.128.100	-	-	-	-	89%	-	-
Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan	-	-	-	-	131.329.300	-	-	-	-	112.429.300	-	-	-	-	86%	-	-
Pelayanan administrasi perizinan dan fasilitasi front office	-	-	-	-	108.749.800	-	-	-	-	99.624.800	-	-	-	-	92%	-	-
Penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pelayanan Perizinan	-	-	-	-	4.074.000	-	-	-	-	4.074.000	-	-	-	-	100%	-	-
Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	302.195.500	623.535.000	1.033.775.100	534.926.600	-	299.435.500	604.461.500	1.031.545.100	523.446.100	-	99%	97%	100%	98%	-	539.863.174
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber Pendapatan Daerah	211.052.500	302.195.500	307.535.000	718.475.100	534.926.600	-	299.435.500	294.461.500	716.245.100	523.446.100	-	99%	96%	100%	98%	465.783.049	383.538.174
Program Penataan Peraturan Perundang Undanga	-	-	158.000.000	157.650.000	-	-	-	155.000.000	157.650.000	-	-	-	98%	100%	-	-	-
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang Undnagan	-	-	158.000.000	157.650.000	-	-	-	155.000.000	157.650.000	-	-	-	98%	100%	-	-	-
Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-	51.712.500	-	-	-	52.387.400	51.712.500	-	-	-	-	100%	-	-
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	52.737.400	51.712.500	-	-	-	52.387.400	51.712.500	-	-	-	99%	100%	-	-

---

### 2.3.2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan SKPD dilihat dengan menyandingkan anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra 2013-2018, hal ini dapat dilihat dari rasio antara realisasi dan anggaran sebagai bagian dari kinerja keuangan SKPD pada Tabel T-C.24.

Target dan realisasi anggaran selama periode Renstra 2013-2018 sudah sesuai dengan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Dari 14 program, rata-rata terealisasi di atas 90%, dan di tahun 2014 terdapat 2 (dua) program masih terealisasi di bawah 80%.

Rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari tahun 2013-2018 realisasi terendah di tahun 2014 sebesar 95%, tingkat capaian rasio antara realisasi dan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur realisasi terendah ada di tahun 2014 sebesar 75% hal tersebut dipengaruhi serapan realisasi untuk pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas hanya digunakan sebesar 66% dari total dana yang dianggarkan hal ini disebabkan karena kurangnya kerusakan / pergantian suku cadang pada kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat serta adanya efisiensi/ penghematan pembelian BBM;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur hanya dianggarkan di tahun 2016 dengan capaian realisasi sebesar 100%;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur realisasi terendah di tahun 2014 sebesar 74% hal tersebut dipengaruhi serapan realisasi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hal ini disebabkan karena aparaturnya yang mengikuti Diklatpim tidak sesuai yang ditargetkan.
- e. Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan tingkat capaian rasio antara realisasi dan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan;
- f. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa, program ini terdiri dari satu kegiatan yang hanya dilaksanakan pada Tahun 2016 dengan realisasi sebesar 100%, cakupan kegiatan ini adalah pembuatan Sistem Layanan Perizinan secara online.

- 
- g. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, program ini merupakan program kegiatan Kantor Promosi dan Penanaman Modal dengan capaian rata diatas 90%.
  - h. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, rata rata realisasi pada kegiatan ini mencapai diatas 90%.
  - i. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, program ini merupakan program baru yang dilaksanakan tahun 2017 dengan capaian 100%.
  - j. Pengembangan Kemitraan, realisasi dari pelaksanaan program ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dengan realisasi sebesar 100%.
  - k. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, program ini merupakan program baru yang dilaksanakan pada tahun 2017 dengan capaian 89% dikarenakan target yang ingin dicapai pada kegiatan peninjauan lokasi terlalu tinggi sehingga realisasi sebesar 86%.
  - l. Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, realisasi anggaran pada kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan yaitu 100%.
  - m. Program Penataan Peraturan Perundang Undangan hanya dilaksanakan ditahun 2015 dan 2016 dengan realisasi capaian rata-rata diatas 90%.
  - n. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, program ini baru dilaksanakan pada tahun 2017 dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut diatas, jika dilihat dari jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), kami masih sangat kekurangan, karena jika sesuai dengan analisis jabatan berjumlah 72, namun kondisi saat ini hanya berjumlah 30. Sehingga kami harus mengoptimalkan dan memaksimalkan personil yang ada dan memanfaatkan Sumber Daya Tenaga Kontrak untuk membantu dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.4.1 Faktor Internal**

- 1). Kekuatan:
  - a) Tersedianya regulasi untuk melaksanakan kewenangan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b) Adanya dukungan/komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat/ pemohon izin;

---

c) Tersedianya Sistem Informasi dan Manajemen Perizinan secara Elektronik (SIMPEL) untuk mendukung proses perizinan dan non perizinan.

2). Kelemahan:

- a) Kuantitas/kompetensi aparatur dalam penanganan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu belum optimal dan belum memadai;
- b) Prasarana gedung kantor yang kurang memadai;
- c) Koordinasi antar bidang belum optimal;
- d) Keterbatasan anggaran;
- e) Belum berlakunya secara efektif sistem reward dan punishment;

**2.4.2. Faktor Eksternal**

1). Peluang

- a) Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
- b) Adanya dukungan dari Pemangku Kepentingan (*stakeholder*).
- c) Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara cepat dan memuaskan masyarakat;

2). Ancaman

- a) Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
- b) Kebutuhan penanam modal akan informasi yang diperlukan untuk melakukan investasi belum terpenuhi;
- c) Pemahaman penanam modal terhadap ketentuan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan masih rendah;
- d) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah.

Berdasarkan gambaran tentang potensi dan permasalahan lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

- 
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
  4. Perbaiki sistem pengendalian internal di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Bone. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
  5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
  6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan asset;
  7. Sikap masyarakat yang kurang antusias terhadap pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

- ♦ Belum Tersedianya Data Base Investasi dan Regulasi Insentif Penanaman Modal;
- ♦ Ketepatan Jangka Waktu Penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan belum sesuai SOP.
- ♦ Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman modal;
- ♦ Masih kurangnya dukungan kebijakan maupun regulasi terhadap kegiatan promosi guna mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Bone;
- ♦ Masih rendahnya kegiatan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan pengembangan Investasi dan Penanaman Modal;
- ♦ Belum terwujudnya kerjasama yang sinergis antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dunia usaha maupun stakeholder terkait lainnya dalam pengembangan investasi dan penanaman modal;
- ♦ Secara kuantitas maupun kualitas kerjasama dalam pengembangan investasi dan penanaman modal masih belum sesuai harapan;
- ♦ Terbatasnya kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
- ♦ Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan surat izin baik berupa surat Izin Mendirikan Bangunan maupun surat surat izin lainnya yang wajib dimiliki;
- ♦ Masih adanya masyarakat yang memakai jasa calo untuk penerbitan surat izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan;

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

**Visi Pembangunan Kabupaten Bone 2018 – 2023** adalah:

**“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat

---

Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasamadengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**,dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**,mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **Misi Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023**

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.

5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, prioritas pembangunan disasar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone adalah pada misi :

1. Misi kesatu : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Misi Kelima kelima, yakni: "Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan public"

**Tabel 3.2**

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>Visi : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera</b>				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<b>Misi</b> : 1. Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Rendahnya Pemahaman Aparat dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terbatasnya Anggaran untuk mengikuti Bimbingan Tekhnis	Adanya komitmen dari seluruh jajaran di Dinas PMPTSP
1.	<b>Misi</b> : 5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan	Belum tersedianya DataBase	Kurangnya alokasi anggaran untuk	Adanya komitmen dari seluruh jajaran di Dinas PMPTSP

<b>Visi : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera</b>				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	Investasi dan Regulasi Insentif Penanaman Modal	pelaksanaan	
		Jangka Waktu Penerbitan Dokumen Perizinan dan Non perizinan yang belum sesuai dengan Sistem dan Prosedur	Rendahnya pengawasan terhadap tim teknis dalam hal kajian dokumen perizinan	Adanya komitmen dari seluruh jajaran di Dinas PMPTSP dan Tim Teknis dari SKPD terkait

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi/ Kabupaten/Kota**

#### **3.3.1. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga**

Pada sisi lain, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI) sebagai badan yang memiliki keterkaitan kerja dengan DPMPTSP Kabupaten Bone, telah menetapkan visinya, yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mewujudkan misi tersebut, akan ditempuh melalui 3 (tiga) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

---

### Keterkaitan Renstra K/L dengan Renstra SKPD

Sasaran Renstra K/L	Renstra SKPD
Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Nilai Investasi

Faktor Penghambat:

- Masih Terbatasnya kapasitas dan kuantitas SDM dalam sektor Penanaman Modal.

Faktor Pendorong:

- Adanya upaya menerapkan perizinan dan non perizinan penanaman modal secara online sebagai salah satu cara mengatasi keterbatasan kuantitas SDM

#### 3.3.2. Telaah Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Dengan memperhatikan salah satu sasaran rancangan Renstra Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Meningkatkan daya tarik Penanaman Modal melalui Promosi yang terpadu dan efektif dan Meningkatkan Kualitas iklim Penanaman Modal yang berdaya saing maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone merumuskan sasaran Meningkatkan Nilai Investasi

#### Keterkaitan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi

Sasaran Renstra Propinsi Sul-Sel	Renstra SKPD
Meningkatnya Realisasi Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi

Faktor Penghambat: -

Faktor Pendorong:

- Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Propinsi terkait urusan Penanaman Modal dan

---

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabuptaen di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi dengan luas wilayah 7,3% dari seluruh luas propinsi sulawesi selatan, kondisi geografis dengan ketinggian antar 0 sampai lebih dari 1000 meter diatas permukaan laut memungkinkan untuk pengembangan berbagai kegiatan ekonomi seperti sektor pertanian,dan perkebunan,kehutanan, perdagangan dan industry, serta sektor pertambangan dan enery.

Untuk itu dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat dan untuk mengarahkan pembangunan diKabupaten Bone Maka pemerintah kabupaten bone menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2033. Yang berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone. Tujuan penataan ruang Kabupaten Bone adalah mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan di dukung masyarakat melalui pengembangan pertanian, perikanan dan kelautan berbasis konservasi dan mitigasi bencana.

Berdasarkan perda nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bone Tahun 2013-2033 berfungsi sebagai pedoman untuk :

- a. Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bone;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antarsektor di Kabupaten Bone;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Bone; dan
- e. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Bone dengan kawasan sekitarnya.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk

---

mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone mempunyai kewenangan memberikan izin membangun, yang dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan sudah berpedoman pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten bone Tahun 2013-2033, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Bone sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam, dan iklim penanaman modal yang menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat.

#### **3.4.2.Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bone dalam penyusunan RPJMD merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan sekaligus sebagai upaya peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bone sebagaimana amanat pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 32 Tahun

---

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam proses penyusunan KLHS RPJMD Kab. Bone keterlibatan aktif stakeholders baik institusi pemerintah, akademisi dan masyarakat telah dilaksanakan, oleh karena itu keberlanjutan pelibatan seluruh stakeholders dalam pengawasan implementasi kajian tersebut perlu tetap diperkuat agar target-target yang telah direncanakan dapat dicapai dengan hasil maksimal. Hal ini diperlukan juga untuk melihat sejauh mana target-target tersebut telah dicapai dan dapat merespon dinamika perubahan yang terjadi pada kondisi lingkungan sebagai eksekusi dari pembangunan yang telah dilakukan di Kabupaten Bone.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu merupakan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bone yang menangani urusan penanaman modal. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu memiliki 2 indikator yang menjadi kewenangannya. Indikator tersebut merupakan indikator dari tujuan TPB nomor 8. Isu strategis Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. Indikator-indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional harus diberikan perhatian khusus dan direkomendasikan untuk selanjutnya diberikan ruang dalam rancangan program dan kegiatan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di masa depan dalam rangka mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan di daerah.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Bone tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kabupaten Bonea. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya

---

tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Sejalan dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkembang dengan sangat pesat maka dalam perencanaan strategis 2018- 2023 harus mempertimbangkan dan melihat isu-isu strategis yang ada antara lain:

1. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten;
2. Pada satu sisi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan semakin tinggi pada sisi yang lain kemampuan anggaran sangat terbatas padahal dukungan anggaran sangat penting dalam keberhasilan suatu program dan kegiatan;
3. Tertib administrasi dan adanya kepastian hukum berusaha di bidang Penanaman Modal mendorong terciptanya iklim investasi di Kabupaten Bone yang lebih kondusif;
4. Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Kabupaten Bone;

---

5. Dengan bergantinya nama OPD baru dan penambahan kewenangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dan pengembangan sarana prasarana pendukungnya.

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dengan partisipasi berbagai pihak pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi yang ada. Kondisi umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone secara makro yang diinginkan atau diproyeksikan ke depan pada akhir Pembangunan Jangka Menengah (PJM) yaitu tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Semua izin diharapkan didukung dengan SIM Perizinan yang komprehensif;
- Semua jenis perizinan yang ditangani sudah ada payung hukumnya ( Perda, Perwal, Perka, dsb) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Investasi di Kabupaten Bone meningkat, terciptanya lapangan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone menjadi meningkat;
- Didukung sarana dan prasarana yang layak, memadai dan memudahkan bagi kaum Disabilitas khususnya;
- Jumlah SDM yang ideal sesuai Analisis Jabatan 72 (Tujuh Puluh Dua) orang.

**4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki Tujuan :

- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- Mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan
- Meningkatkan nilai investasi penanaman modal di Kabupaten Bone

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki indikator tujuan yaitu :

- Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP
- Presentase Rumah ber IMB
- Presentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi Izin Usaha
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
- Presentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin Usaha
- Nilai PMDN/ PMA pertahun

*Tabel 4.1*

*Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tahun 2018-2023*

NO	Tujuan	Indikator Tujuan
1	2	4
<b>I</b>	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP
<b>II</b>	Mewujudkan tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan	Persentase Rumah Ber-IMB
		Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
<b>III</b>	Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMDN / PMA per tahun

#### 4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone yaitu :

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
- Meningkatnya Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone.

Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki indikator tujuan yaitu :

- Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP
- Presentase Rumah ber IMB
- Presentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi Izin Usaha
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
- Presentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin Usaha
- Nilai PMDN / PMA pertahun.

Tabel 4.2

Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tahun 2018-2023

NO	Sasaran	Indikator Sasaran
1	3	4
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP
II	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Persentase Rumah Ber-IMB
		Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
		Presentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
III	Meningkatnya Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMDN / PMA per tahun

Capaian Target kinerja sasaran di tahun 2018 Nilai Predikat Nilai SAKIP adalah CC, sedangkan target Tahun 2019 B, 2020 B, 2021 BB, 2022 BB, 2023 A. Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 A-, sedangkan target Tahun 2019 A-, Tahun 2020 A-, Tahun 2021 A-, Tahun 2022 A, Tahun 2023 A. Capaian presentase Rumah Ber IMB Tahun 2018 70%, sedangkan target Tahun 2019 sebesar 75%, Tahun 2020 78%, Tahun 2012 80%, Tahun 2022 82%, Tahun 2023 85%. Presentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin Usaha di Tahun 2018 belum diukur, untuk target Tahun 2019 65%, Tahun 2020 70%, Tahun 2021 72%, Tahun 2022 75%, Tahun 2023 80%. Capaian Nilai PMDN / PMA untuk tahun Tahun 2018 135.925.000.000, sedangkan target Tahun 2019 sebesar 150M, untuk tahun 2020 sebesar 175M, untuk tahun 2021 sebesar 200M, untuk tahun 2022 sebesar 225M, dan untuk di tahun terakhir 2023 sebesar 250M. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dapat di sajikan pada tabel T-C.25.

NO	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke				
			Tahun-1 (2019)	Tahun-2 (2020)	Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)
1	3	4	5	6	7	8	9
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	B	BB	BB	A
II	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Persentase Rumah Ber-IMB	75%	77%	80%	83%	85%
		Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha	65%	70%	72%	75%	80%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	A- 71 - 78	A- 71 - 78	A- 71 - 78	A 88 - 100	A 88 - 100
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%
III	Meningkatnya Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMDN / PMA per tahun	150M	175M	200M	225M	250M

Sebagai penjabaran Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone, maka ada beberapa strategi dan arah kebijakan yang diambil agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik :

Strategi I : Meningkatkan tata kelola DPMPTSP selaku Institusi Pelayanan Publik yang dilakukan secara bertahap terkait ;

- Akuntabilitas dan manajemen kinerja
- Pengelolaan SDM
- Praktek profesional
- Dukungan anggaran sarana dan prasarana

Dengan Arah kebijakan Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik terkait Perizinan secara menyeluruh terkait :

- Akuntabilitas dan manajemen kinerja
- Pengelolaan SDM
- Praktek profesional
- Dukungan anggaran sarana dan prasarana

Strategi II : Meningkatkan Kemudahan Proses Pelayanan Perizinan

Arah Kebijakan : Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Strategi III : Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan

Arah Kebijakan : Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Layanan Perizinan dan Penanaman Modal

Strategi IV : Mendorong terwujudnya Iklim Investasi Penanaman Modal yang Kondusif dan berdaya saing.

Arah Kebijakan :

- Peningkatan Iklim Investasi yang baik
- Penyiapan dokumen data potensi sumberdaya serta sarana prasarana daerah terkait Investasi Penanaman Modal
- Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi penanaman modal.

Tabel T-C.26 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone sudah

relevan dan konsisten terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang dapat disajikan dalam tabel T-C.26

<b>Isu Strategis</b>	1	Perlunya dukungan fasilitas dan kemudahan bagi Investor yang berinvestasi di Kabupaten Bone		
	2	Perlunya peningkatan kualitas melalui pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone, sehingga pelayanan akan semakin meningkat menuju terciptanya pelayanan prima dan <i>good governance</i> ;		
	3	Perlunya meningkatkan pemantauan, pengawasan, pembinaan serta penanganan pengaduan pelayanan Perizinan dan penanaman Modal		
<b>Visi : Masyarakat Bone yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera</b>				
<b>Misi I: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
1	2	3	4	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	Meningkatkan tata kelola DPMPPTSP selaku Institusi Pelayanan Publik yang dilakukan secara bertahap terkait : - Akuntabilitas dan manajemen Kinerja; - Pengelolaan SDM - Praktek Profesional - Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik perizinan secara menyeluruh terkait : - Akuntabilitas dan manajemen Kinerja; - Pengelolaan SDM - Praktek Profesional - Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana	
Mewujudkan tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Meningkatkan kemudahan proses pelayanan perizinan	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
		Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan	Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Layanan Perizinan dan Penanaman Modal	
<b>Misi V: Mendorong Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan public</b>				
Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Meningkatnya Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PM	
			Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti	
			Jumlah Tenaga/Aparat Pengelola Keuangan yang mendapat jasa adm keuangan	

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merencanakan 10 (sepuluh) Program serta 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dengan perincinan sebagai berikut:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 6 kegiatan:**
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik;
  - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan;
  - e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah;
  - f. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran;
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 8 kegiatan:**
  - a. Pembangunan gedung Kantor;
  - b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - c. Pengadaan Meubeleur;
  - d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
  - e. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
  - f. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ kantor;
  - g. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional;
  - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
  - i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan :**
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 3 Kegiatan :**
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
  - b. Sosialisasi Peraturan Perundang undangan;
  - c. Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 2 kegiatan:**
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun.
- 6. Program penunjang pemerintahan umum, terdiri dari 2 kegiatan ;**
  - a. Penyusunan rencana perangkat daerah;

- 
- b. Pengelolaan website perangkat daerah.
- 7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, terdiri dari 4 kegiatan:**
- a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;
  - b. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
  - c. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi;
  - d. Penyelenggaraan pameran investasi.
- 8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, terdiri dari 2 kegiatan:**
- a. Perencanaan dan penyusunan kebijakan Penanaman Modal;
  - b. Peningkatan Pelayanan Investasi.
- 9. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, terdiri dari 2 kegiatan ;**
- a. Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi;
  - b. Penyusunan data peluang investasi.
- 10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, terdiri dari 9 kegiatan;**
- a. Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan;
  - b. Pelayanan Administrasi Perizinan;
  - c. Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pelayanan Perizinan;
  - d. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan perizinan;
  - e. Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan perizinan;
  - f. Layanan Pengarsipan dan penerbitan Perizinan;
  - g. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat;
  - h. Penanganan Pengaduan Pelayanan;
  - i. Penyusunan dan Pengembangan Regulasi Perizinan.

Adapun penyajiannya menggunakan tabel T-C.27 *terlampir*

**Tabel TC.27**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran		B	639.534.000	B	703.487.400	B	773.836.140	BB	851.219.754	BB	936.341.729	A	1.029.975.902
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Rek telepon, TV Kabel	36 Rek	36 Rek	120.720.000	36 Rek	132.792.000	36 Rek	146.071.200	36 Rek	160.678.320	36 Rek	176.746.152	36 Rek	194.420.767
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga/Aparat Pengelolah Keuangan yang mendapat jasa adm keuangan	47 Orang	47 Orang	37.452.000	47 Orang	41.197.200	47 Orang	45.316.920	47 Orang	49.848.612	47 Orang	54.833.473	47 Orang	60.316.821
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang tersedia dan tenaga kebersihan yang mendapat jasa/upah kerja	18 Jenis,	18 Jenis, 1 Orang	6.299.000	20 Jenis, 1 Orang	6.928.900	20 Jenis, 1 Orang	7.621.790	20 Jenis, 1 Orang	8.383.969	20 Jenis, 1 Orang	9.222.366	20 Jenis, 1 Orang	10.144.602
				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media bahan bacaan yang tersedia Jumlah media yang menayangkan iklan	13 Jenis	13 Jenis	37.300.000	13 Jenis	41.030.000	13 Jenis	45.133.000	13 Jenis	49.646.300	13 Jenis	54.610.930	13 Jenis	60.072.023
				Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka koordinasi dan konsultasi	50 Kali	60 kali	250.000.000	62 kali	275.000.000	65 kali	302.500.000	65 kali	332.750.000	67 kali	366.025.000	67 kali	402.627.500

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	cakupan pelaksanaan administrasi perkantoran	5 Jenis	3 Jenis	187.763.000	5 Jenis	206.539.300	5 Jenis	227.193.230	5 Jenis	249.912.553	5 Jenis	274.903.808	5 Jenis	302.394.189
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100%	100%	5.339.520.000	100%	800.252.000	100%	388.277.200	100%	443.604.920	100%	431.465.412	100%	677.111.953
				Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang di bangun	-	1 Unit	5.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	1 Kendaraan Roda 4	3 Unit Kendaraan Roda dua	75.000.000	1 Kendaraan Roda 4, 2 Kendaraan Roda 2	350.000.000	-	-	-	-	3 Kendaraan Roda 2	75.000.000	1 Kendaraan roda 4, 5 Kendaraan Roda 2	-
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	6 Unit	55.200.000	10 Unit	120.000.000	5 Unit	50.000.000	7 Unit	65.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	55.000.000
				Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	-	0	-	10 Unit	100.000.000	5 unit	85.000.000	5 Unit	100.000.000	0	-	20 Unit	285.000.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Perbaikan Gedung Kantor	1 Paket	-	50.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	60.500.000	1 Paket	66.550.000	1 Paket	73.205.000	5 Paket	80.525.500
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara secara rutin	14 Unit, 3 Kendaraan Roda 4, 11 Unit Roda 2	17 Unit	116.270.000	17 Unit	127.897.000	17 Unit	140.686.700	17 Unit	154.755.370	20 Unit	170.230.907	20 Unit	187.253.998
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin	70 Unit	76 Unit	43.050.000	86 Unit	47.355.000	91 Unit	52.090.500	98 Unit	57.299.550	103 Unit	63.029.505	103 Unit	69.332.456

Rencana Strategis (Renstra)  
DPMPTSP Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	-	30 Pasang	23.000.000	73 Pasang	50.000.000	-	-	-	-	80 pasang	75.000.000	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	-	30 pasang	23.000.000	73 Pasang	50.000.000	-	-	-	-	80 Pasang	75.000.000	0	-
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Presentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	93.000.000	100%	122.212.500	100%	130.008.750	100%	116.459.625	100%	125.893.088	100%	136.269.896
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Formal	1 Orang	1 Orang	22.125.000	2 Orang	44.250.000	2 Orang	44.250.000	1 Orang	22.125.000	1 Orang	22.125.000	1 Orang	22.125.000
				Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Kecamatan Pelaksanaan Sosialisasi	27 Kec	5 kec	45.875.000	6 Kec	50.462.500	5 Kec	55.508.750	5 Kec	61.059.625	6 Kec	67.165.588	27 Kec	73.882.146
				Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Tekhnis	8 Orang	5 Orang	25.000.000	12 Orang	27.500.000	10 Orang	30.250.000	5 Orang	33.275.000	7 Orang	36.602.500	40 Orang	40.262.750
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	3 Dok	4 Dok	14.650.000	4 Dok	16.115.000	4 Dok	17.726.500	4 Dok	19.499.150	4 Dok	21.449.065	4 Dok	23.593.972

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)		
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang telah disusun	3 Dok	4 Dok	14.650.000	4 Dok	16.115.000	4 Dok	17.726.500	4 Dok	19.499.150	4 Dok	21.449.065	4 Dok	23.593.972
				<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran	100%	100%	60.000.000	100%	66.000.000	100%	72.600.000	100%	79.860.000	100%	87.846.000	100%	96.630.600
				Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dok	7 Dok	25.000.000	6 Dok	27.500.000	6 Dok	30.250.000	6 Dok	33.275.000	7 Dok	36.602.500	7 Dok	40.262.750
				Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah paket pengembangan aplikasi perizinan online dan website DPMPTP. Jumlah Editor Website yang dibayar	-	1 Paket	35.000.000	1 Paket	38.500.000	1 Paket	42.350.000	1 Paket	46.585.000	1 Paket	51.243.500	1 Paket	56.367.850
Mewujudkan tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait perizinan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Nilisi Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Perizinan		<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	Presentase Jumlah dokumen Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan sesuai Sistem dan Prosedur		75%	1.110.646.000	75%	1.221.710.600	80%	1.343.881.660	85%	1.478.269.826	90%	1.626.096.809	95%	1.788.706.489
		<b>Persentase Rumah Ber-IMB</b>		Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan	Jumlah izin yang telah dikaji, diteliti dan ditinjau		1500 izin	129.052.000	1600 izin	141.957.200	1700 izin	156.152.920	1800 izin	171.768.212	1900 izin	188.945.033	8500 izin	207.839.537

Rencana Strategis (Renstra)  
DPMPTSP Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)		
		Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha		Pelayanan administrasi perizinan	Jumlah izin yang telah didaftar dan diserahkan	6000 izin	7000 izin 109.030.000	7200 izin 119.933.000	7500 izin 131.926.300	7700 izin 145.118.930	8000 izin 159.630.823	37400 izin 175.593.905						
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal		Penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pelayanan Perizinan	Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan	1 Dok	1 Dok 7.100.000	1 Dok 7.810.000	1 Dok 8.591.000	1 Dok 9.450.100	1 Dok 10.395.110	5 Dok 11.434.621						
				Layanan Pengarsipan dan Penerbitan Perizinan	Jumlah Izin terbit dan diarsipkan	6000 izin	7000 izin 485.224.000	7200 izin 533.746.400	7500 izin 587.121.040	7700 izin 645.833.144	8000 izin 710.416.458	37400 izin 781.458.104						
				Penyusunan dan Pengembangan Regulasi Perizinan	Jumlah Dokumen Perubahan Regulasi Perizinan	-	7 Dok 104.490.000	2 Dok 114.939.000	2 Dok 126.432.900	2 Dok 139.076.190	2 Dok 152.983.809	15 Dok 168.282.190						
				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan perizinan	Jumlah laporan hasil Monev penyelenggaraan perizinan	1 Dok	1 Dok 123.553.000	1 Dok 135.908.300	1 Dok 149.499.130	1 Dok 164.449.043	1 Dok 180.893.947	5 Dok 198.983.342						
				Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Perizinan	-	4 Dok 56.925.000	4 Dok 62.617.500	4 Dok 68.879.250	2 Dok 75.767.175	2 Dok 83.343.893	16 Dok 91.678.282						
				Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dok	1 Dok 81.022.000	1 Dok 89.124.200	1 Dok 98.036.620	1 Dok 107.840.282	1 Dok 118.624.310	1 Dok 130.486.741						

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)		
				Penanganan Pengaduan Pelayanan	jumlah laporan data layanan informasi perizinan dan kasus penanganan pengaduan	1 Laporan	1 Laporan	14.250.000	1 Laporan	15.675.000	1 Laporan	17.242.500	1 Laporan	18.966.750	1 Laporan	20.863.425	1 Laporan	22.949.768
Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Meningkatnya Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMDN/PMA per tahun		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	135.925 M	150M	55.500.000	175m	61.050.000	200m	67.155.000	225m	73.870.500	250m	81.257.550	1.T	89.383.305
				Perencanaan dan penyusunan kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Regulasi Pemberian Insentif PM	-	1 Dok	35.000.000	1 Dok	38.500.000	1 Dok	42.350.000	1 Dok	46.585.000	1 Dok	51.243.500	5 Dok	56.367.850
				Peningkatan pelayanan Investasi	Jumlah Dokumen SOP layanan Investasi	-	1 Dok	20.500.000	1 Dok	22.550.000	1 Dok	24.805.000	1 Dok	27.285.500	1 Dok	30.014.050	5 Dok	33.015.455
				Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Presentase ketersediaan Dokumen database Iklim Investasi	5%	50%	37.240.000	50%	40.964.000	65%	45.060.400	70%	49.566.440	75%	54.523.084	90%	59.975.392

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)		
				Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Potensi Sumber Daya Daerah dan valuasi RUPM	-	1 Dok	18.600.000	1 Dok	20.460.000	1 Dok	22.506.000	1 Dok	24.756.600	1 Dok	27.232.260	5 Dok	29.955.486
				Penyusunan Data Peluang Investasi	Jumlah Buku Profil Potensi Unggulan	-	10 Buku	18.640.000	10 Buku	20.504.000	10 Buku	22.554.400	10 Buku	24.809.840	10 Buku	27.290.824	10 Buku	30.019.906
				<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	Jumlah Investor Penanaman Modal	43	50	366.910.000	60	403.601.000	65	443.961.100	80	488.357.210	90	537.192.931	388	590.912.224
				Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah Dokumen kerjasama yang diterbitkan	-	1 Dok	32.510.000	2 Dok	35.761.000	3 Dok	39.337.100	3 Dok	43.270.810	3 Dok	47.597.891	12 Dok	52.357.680
				Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PM	6 Keg	6 Keg	31.400.000	50 Keg	34.540.000	60 Keg	37.994.000	70 Keg	41.793.400	80 Keg	45.972.740	80 Keg	50.570.014
				Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Peserta	100 Peserta	35.000.000	100 Peserta	38.500.000	100 Peserta	42.350.000	100 Peserta	46.585.000	100 Peserta	51.243.500	500 Peserta	56.367.850
				Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti	4 Keg	4 Keg	268.000.000	4 Keg	294.800.000	4 Keg	324.280.000	5 Keg	356.708.000	5 Keg	392.378.800	5 Keg	431.616.680



Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Adapun indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone yaitu :

- Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP;
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Perizinan
- Presentase Rumah ber IMB
- Presentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi Izin Usaha
- Presentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
- Nilai PMDN / PMA per tahun

Dengan didukung 10 indikator program yaitu :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  - Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
  - Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
  - Cakupan Realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
  - Presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
  - Cakupan realisasi penyusunan Dokuen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran
- Program Penunjang Pemerintahan Umum;
  - Cakupan realisasi kegiatan penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran
- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
  - Jumlah investor penanaman modal

- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
  - Presentase jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur
- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
  - Jumlah nilai realisasi investasi
- Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana daerah.
  - Presentase ketersediaan dokumen database iklim investasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran
			Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Presentase Jumlah dokumen Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan sesuai Sistem dan Prosedur
II	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Persentase Rumah Ber-IMB	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Presentase Jumlah dokumen Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan sesuai Sistem dan Prosedur
		Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Presentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal		
III	Meningkatnya Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMDN / PMA per tahun	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi
			Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Presentase ketersediaan Dokumen database Iklim Investasi
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor Penanaman Modal

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone sudah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, hal ini disajikan dalam tabel T-C.28.

---

Tabel T-C.28

*Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai PMDN/PMA per tahun	120.000.000.000	150.000.000.000	175.000.000.000	200.000.000.000	225.000.000.000	250.000.000.000	1.000.000.000



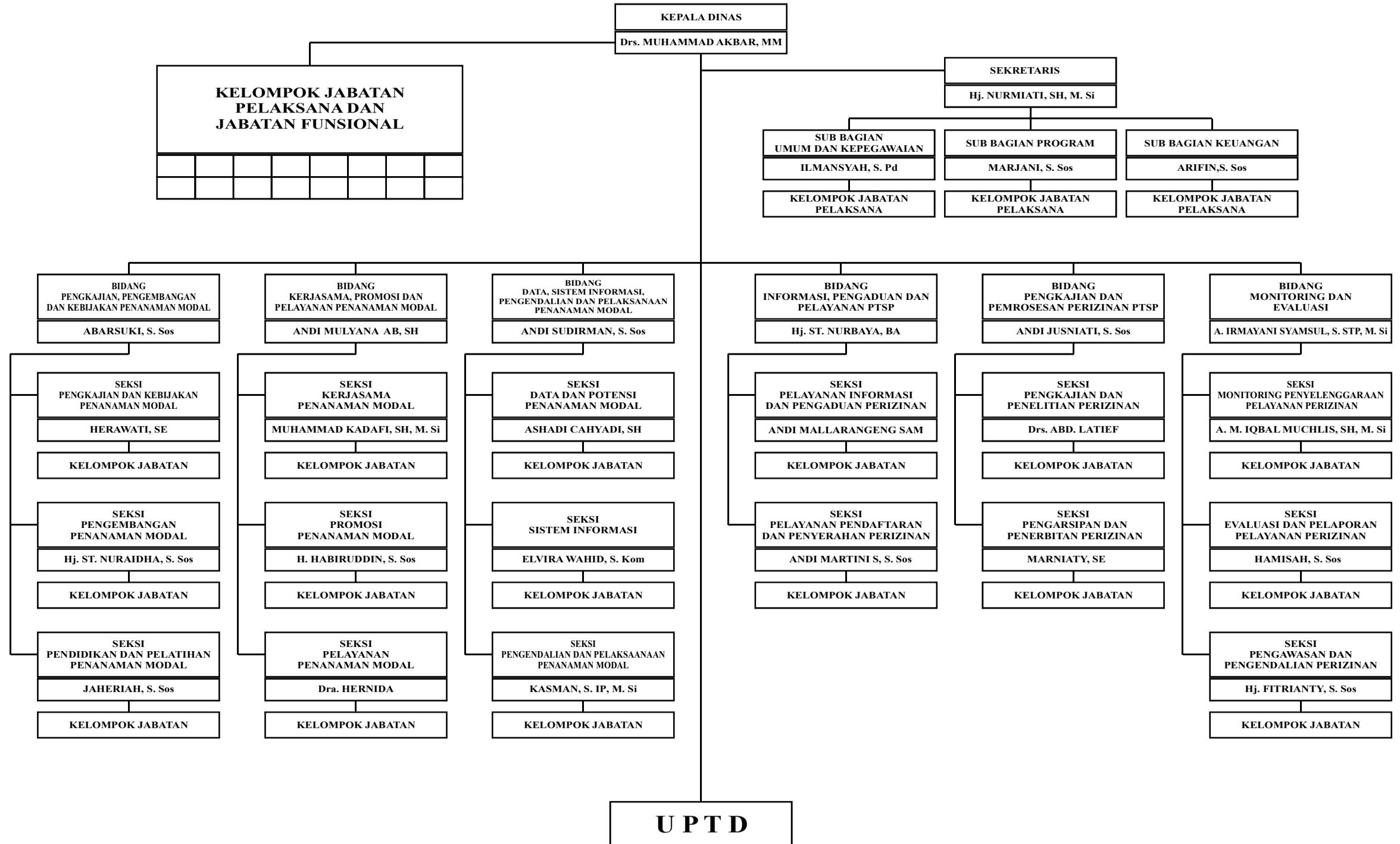
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kabupaten Bone dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 serta isu-isu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini telah memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya visi, misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone untuk jangka waktu 2018-2023. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2018-2023, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Renstra Tahun 2018-2023 ini diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAKBUPATEN BONE**



Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

TUJUAN

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

SASARAN

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

INDIKATOR

Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP

Misi V: Mendorong Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan

TUJUAN

Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone

SASARAN

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Meningkatnya Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone

INDIKATOR

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat  
Presentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal  
Presentase Rumah Ber-IMB  
Presentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha

NILAI PMDN / PMA PERTAHUN

PROGRAM

<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>				<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>				
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pembangunan Gedung Kantor	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan perizinan	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Penyelenggaraan pameran investasi	Perencanaan dan penyusunan kebijakan Penanaman Modal	Peningkatan pelayanan Investasi	Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	Penyusunan Data Peluang Investasi
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan		Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi perizinan	Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan.	Penanganan Pengaduan Pelayanan								
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan			Penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pelayanan Perizinan	Layanan Pengarsipan dan Penerbitan Perizinan	Penyusunan dan Pengembangan Regulasi Perizinan								
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor															
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional															
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor															

PENANGGUNG JAWAB

SEKERTARIAT	BIDANG PENGKAJIAN DAN PEMROSESAN PERIZINAN PTSP	BIDANG INFORMASI, PENGADUAN DAN PELAYANAN PERIZINAN PTSP	BIDANG MONITORING DAN EVALUASI	BIDANG PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL	BIDANG KERJASAMA, PROMOSI DAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL	BIDANG PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL	BIDANG PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL	BIDANG KERJASAMA, PROMOSI DAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL	BIDANG PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL	BIDANG PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
-------------	---	--	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---